

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum pendidikan karakter dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) pada tahun 2010 yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter 2010 (Puskurbuk, 2011, hlm. 1), para pendiri bangsa Indonesia telah menyadari mengenai pentingnya pembangunan karakter bangsa. Sejak awal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para *founding fathers* menyadari bahwa yang perlu dibangun itu bukan hanya negara (*state*), tetapi juga bangsa. Bahkan pembangunan bangsa merupakan hal yang sangat utama, suatu negara akan maju apabila bangsa dan masyarakatnya mempunyai kualitas yang baik, oleh karena itulah para pendiri bangsa menekankan pentingnya pembangunan karakter bangsa (*nation* dan *character building*). Bahkan para *founding fathers* telah memberikan arahan dan landasan yang jelas bagi pembangunan karakter bangsa Indonesia yaitu Pancasila, karena Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan juga harus menjadi pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia.

Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, oleh karena itulah Pancasila dijadikan sebagai instrumen untuk membentuk warga negara dan masyarakat yang baik (*good citizenship*), yang berkarakter mulia, dan mampu mewujudkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya baik dalam perkataan dan tindakan keseharian masyarakatnya.

Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan isi dan sekaligus penekanan fungsi Pancasila. Pada awal kemerdekaan, ada mata pelajaran *Civics* (sekitar 1957-1958), kemudian berganti nama menjadi Kewarganegaraan (sekitar tahun 1962). Pada awal Orde Baru mata pelajaran Kewarganegaraan berubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) yaitu pada kurikulum 1968. Pada tahun 1975 dalam PKN berganti nama dengan Pendidikan Moral Pancasila. Nama ini merujuk kepada Tap MPR No. IV Tahun

Nuruly Masum Aprily, 2019

PENDIDIKAN KARAKTER DI PESANTREN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN CIPARI
KABUPATEN GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1973 tentang GBHN. Kemudian sejak ada Tap MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), materi P-4 masuk kedalam mata pelajaran PMP (Warsono, 2010, hlm. 349). Setelah berganti nama dari mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 1975, lalu pada tahun 1989 menurut Warsono (2010) dengan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional muncul kurikulum baru yang mewajibkan setiap jenjang dan jenis pendidikan wajib ada mata pelajaran Pancasila, Kewarganegaraan, dan agama. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 dan 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993, di sekolah dasar dan menengah wajib ada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kemudian dengan munculnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 mata pelajaran Pendidikan Pancasila hilang dari kurikulum pendidikan nasional, yang ada adalah Pendidikan Kewarganegaraan yakni dalam kurikulum 2006 yang bercirikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Dilihat dari segi konseptual pada mata pelajaran PKN dan PMP/PPKn terdapat beberapa perbedaan dalam hal penekanan. Apabila dalam pelajaran PKN lebih menekankan pada pembentukan warga negara agar memahami mana hak dan kewajiban, sedangkan pada pelajaran PMP/PPKn lebih menekankan pada pembangunan karakter dan nilai-nilai Pancasila. Begitu pun ditinjau dari tujuan, PKN dan PMP/PPKn terdapat perbedaan. Sebagaimana penjelasan dari Warsono (2010) bahwa mata pelajaran PKN lebih menekankan pengembangan karakter siswa dari aspek afektif, sedangkan mata pelajaran PMP/PPKn lebih menekankan pembentukan karakter pada aspek kognisi. Sebenarnya dua aspek ini saling berhubungan dalam pembentukan karakter individu, karena semakin tinggi ilmu seseorang seharusnya semakin baik pula perilaku dalam kehidupannya.

Secara formal, instrumen untuk membangun moral dan karakter bangsa Indonesia sudah ada dalam kurikulum pendidikan sejak dahulu yaitu melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) atau sebelumnya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diberikan sejak sekolah dasar (SD). Namun hal

tersebut oleh pemerintah dirasa masih belum cukup maksimal karena masih berfokus pada aspek kognitif dan afektif peserta didik saja, sedangkan dalam membentuk karakter seseorang memerlukan upaya yang lebih komprehensif yang bukan sekadar transfer ilmu semata melainkan juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai kebaikan kepada peserta didik hingga dapat diimplementasikan menjadi watak dan kepribadian peserta didik, atas dasar itulah pemerintah merumuskan instrumen pembangunan karakter bangsa yang lebih komprehensif yaitu melalui pendidikan karakter, yang akan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran bukan hanya pada mata pelajaran PKn dan pendidikan agama saja.

Pendidikan karakter diluncurkan pertama kali oleh Kemendiknas pada tahun 2010 yaitu di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan harapan kualitas karakter manusia Indonesia dapat meningkat ke arah yang lebih baik. Hal tersebut berangkat dari pemahaman bahwa pembentukan karakter harus dilakukan sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada peserta didik, di mana sekolah tidak hanya menekankan pengembangan kognitif melalui hafalan konsep yang merupakan ciri otak kiri, tetapi juga mengembangkan otak kanan dengan menekankan perasaan, cinta kasih, pembiasaan, dan perbuatan yang baik dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat (Puskur, 2009). Tanpa terasa pelaksanaan pendidikan karakter di berbagai lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah telah berlangsung selama 8 tahun, tentu bukan waktu yang singkat.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, diakui atau tidak memang pada kenyataannya pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah belum cukup berhasil, karena masalah-masalah *immoralitas* pada diri pelajar justru semakin bervariasi. Memang harus dipahami, bahwa pendidikan karakter hanyalah sebagai salah satu ikhtiar dan usaha pemerintah untuk memperbaiki kualitas karakter manusia Indonesia, oleh karena itu tentu perlu adanya perbaikan secara terus menerus dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dan lembaga pendidikan.

Penyebab belum berhasilnya pendidikan karakter di sekolah dewasa ini bukan disebabkan kurangnya nilai-nilai karakter yang ditawarkan atau ditetapkan oleh pemerintah atau sekolah, akan tetapi proses menyampaikan dan mentransfer karakter itulah yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Sebagai contoh

metode pembelajarannya masih lemah karena terlalu fokus pada aspek kognitif level rendah seperti *recall* misalnya, namun belum merangsang aspek *cognitive moral development* di mana guru hanya mewajibkan peserta didik untuk mengetahui, menghafal konsep dan kebenaran tanpa menyentuh perasaan dan hati nurani yang merupakan orientasi dari *cognitive moral development*. Kenyataan ini sesuai dengan pendapat Hanafi (2017, hlm. 37) dalam penelitiannya yang menguraikan bahwa rancangan pendidikan karakter sekarang ini membuat guru tidak fokus dalam menyentuh pribadi peserta didik sehingga nilai-nilai karakter tidak sepenuhnya tertanam menjadi watak dan kepribadian dari peserta didik, sehingga nilai-nilai karakter hanya sekadar hafalan saja. Pendidikan karakter apabila ditinjau dari perspektif psikologis dan filosofis menurut Cooley (2008, hlm. 200) memerlukan suatu strategi pedagogi dan metodologi yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada diri peserta didik melalui pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, karena ketidaktepatan metode yang digunakan menyebabkan pendidikan karakter menjadi tidak efektif.

Selain itu, seperti yang diungkapkan Purnomo (2014, hlm. 67) bahwa pemahaman pendidik, peserta didik, keluarga, bahkan masyarakat terhadap urgensi pendidikan karakter yang jelas merupakan hal yang sangat penting lainnya dalam keberhasilan pendidikan karakter, sehingga akan mempermudah proses dalam mentransfer dan menanamkan nilai-nilai kebaikan pada peserta didik. Pendidikan karakter itu tidak mudah dan merupakan sesuatu hal yang cukup rumit, namun itu semua dapat dilakukan apabila semua pihak saling mendukung serta ditunjang dengan lingkungan dan proses belajar mengajar yang kondusif (Megawangi, 2010, hlm. 2).

Sementara itu Takdir (2014, hlm. 5) berpendapat bahwa belum berhasilnya pendidikan karakter di Indonesia dikarenakan pada prakteknya di sekolah, pendidikan karakter hanya fokus pada pembentukan sikap dan perilaku peserta didik saja. Menurutnya pendidikan karakter juga harus diperkuat melalui penanaman nilai-nilai keagamaan yang berbasis spiritual yaitu pendidikan agama. Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, Megawangi (2010) menjelaskan bahwa sebenarnya pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah sekarang ini sudah

diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran khususnya ke dalam mata pelajaran PKn dan pendidikan Agama. Namun menurutnya, pendidikan karakter dan pendidikan moral yang sebelumnya diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pendidikan kewarganegaraan (PKN) dan pelajaran agama dirasa belum berhasil membentuk karakter peserta didik karena meskipun subjeknya mengandung pelajaran yang baik, mereka tidak meninggalkan jejak dalam cara berperilaku peserta didik (Izfana, 2012, hlm. 77).

Sampai saat ini, secara kurikuler telah dilakukan berbagai upaya untuk menjadikan pendidikan lebih mempunyai makna bagi individu yang tidak sekadar memberi pengetahuan pada tataran kognitif, tetapi juga menyentuh tataran afektif dan konatif melalui mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan IPS, Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Jasmani. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Rodli (2014) dengan judul “Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren “*Studi di Pondok Pesantren Tradisional dan Modern di Kabupaten Ponorogo*” menjelaskan karena kondisi zaman yang berubah dengan cepat, maka upaya-upaya tersebut ternyata belum mampu mewadahi pengembangan karakter secara dinamis dan adaptif terhadap perubahan tersebut.

Kesalahan metodologis dan strategi pedagogis dalam praktik pendidikan karakter di sekolah yang dirangkum dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebabnya, dan hal ini akan berdampak panjang pada kehidupan moral siswa. Kegagalan pendidikan karakter (nilai agama dan moral) karena sekolah masih terbatas pada penyampaian *moral knowing* dan *moral training* tetapi tidak menyentuh *moral being* yaitu membiasakan anak untuk terus menerus melakukan perbuatan moral. Agar tercipta *moral being* siswa tentu dibutuhkan suasana kelas dan sekolah yang kondusif agar nilai moral tersebut teraplikasikan. Tugas seperti itu, menuntut sekolah untuk menjadi lembaga pembudayaan nilai moral, bukan hanya sebagai lembaga pengajaran moral dan lembaga pelatihan moral (Hakam, 2015, hlm. 5), karena pendidikan karakter bukanlah hanya slogan atau sekadar ilmu pengetahuan saja tetapi merupakan misi

yang tertanam dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Sekolah harus berfungsi sebagai tempat di mana siswa dapat mempraktekkan dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan melalui pembiasaan-pembiasaan sehingga akhirnya terbentuk menjadi suatu budaya (Milliren & Messer, 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2014) dengan judul “*Pendidikan Karakter di Indonesia: Antara Asa dan Realita*” dapat diidentifikasi empat penyebab mengapa pendidikan karakter di Indonesia belum cukup berhasil, yaitu diantaranya: 1). Pembelajaran yang ada di sekolah kini lebih cenderung memberikan porsi lebih untuk *transfer of knowledge* daripada *transfer of value*. Padahal menanamkan nilai atau pun karakter adalah hal yang urgen, 2). Pembelajaran yang ada cenderung menitikberatkan pada banyaknya hafalan. Apabila siswa hafal terhadap suatu materi, maka dia akan mendapat nilai yang tinggi tanpa melihat kebiasaan dan perilakunya sehari-hari, 3). Sebagian guru masih merasa bahwa mengajar adalah profesi dan tuntutan pekerjaan, padahal mengajar bukanlah sekadar profesi tetapi merupakan panggilan jiwa, 4). Keteladanan dari para guru merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar.

Sementara itu Wahyuningsih (2017, hlm. 834-835) menyatakan bahwa ada lima faktor yang dapat menjadi penyebab belum berhasilnya pendidikan karakter di sekolah. *Pertama*, faktor tujuan pendidikan karakter di sekolah. Jika sekolah/pendidik tidak memiliki tujuan karakter yang jelas pada anak-anak, upaya yang dilakukan menjadi sia-sia dan tidak berguna. *Kedua*, faktor pendidik itu sendiri. Pendidik memiliki peran utama dalam membangun karakter anak, guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan semata, melainkan sebagai teladan dalam berperilaku sehari-hari yang dilihat oleh siswa. *Ketiga*, faktor peserta didik. Siswa menerima ajaran langsung dan nilai-nilai karakter dari pendidik (orang tua dan guru). Dalam hal ini, anak berhak menentukan cara mereka memilih kepribadian. *Keempat*, faktor alat pendidikan. Ketersediaan media, bahan ajar, alat, dan metode dalam pendidikan karakter yang masih belum maksimal dan tersedia dengan baik di sekolah. *Kelima*, faktor lingkungan. Karena siswa berada di lingkungan sekolah hanya 7-8 jam saja, sementara diluar sekolah masih ada lingkungan masyarakat dan keluarganya di mana siswa berinteraksi lebih lama di

sana. Dibutuhkan sinergitas antara pendidikan yang didapat oleh siswa di sekolah dengan lingkungan masyarakat dan keluarganya.

Sehingga dapat disimpulkan dari berbagai pendapat tersebut bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah seharusnya tidak hanya fokus terhadap aspek pengetahuan siswa mengenai nilai-nilai karakter yang baik saja, melainkan peran pendidik dan segala unsur yang ada di sekolah harus memberikan keteladanan terhadap siswanya, serta membutuhkan kegiatan-kegiatan pembiasaan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sebagai sarana praktis siswa di sekolah, di sinilah peran sekolah sebagai lembaga pembudayaan nilai dan karakter itu sendiri. Kebijakan pendidikan harus mengambil inisiatif untuk mengaktualisasikan pendidikan nilai dan moral dalam sistem sekolah, juga yang tak kalah penting adalah pendidikan karakter merupakan usaha dan ikhtiar bersama, baik orang tua, guru, Kepala Sekolah, dan lingkungan masyarakat yang memiliki peran penting serta mendorong siswa mewujudkan nilai-nilai baik dalam kehidupan mereka (Agboola & Chen, 2012, hlm, 168).

Kekurangan lain dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah adalah terbatasnya waktu yang tersedia bagi guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didiknya, karena paling lama jam persekolahan di sekolah pada umumnya hanya sekitar 7-8 jam sehari. Melihat hal tersebut pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki pendidikan karakter di sekolah dengan menerbitkan kebijakan 5 hari sekolah atau yang lebih dikenal dengan *full day school* (FDS) yang tertuang dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang “Hari Sekolah” (Prastowo, 2017, hlm. 131). Kebijakan ini pada dasarnya merupakan bagian dari penerapan program penguatan pendidikan karakter (PPK) bagi peserta didik (Kemendikbud, 2017; Nuryaman, 2016). Namun munculnya kebijakan tersebut mengundang pro kontra dikalangan masyarakat, terutama dari kalangan PBNU yang bersikap resisten dalam menanggapi munculnya peraturan tersebut, bukan karena tidak setuju dengan konsep penguatan pendidikan karakter (PPK) di sekolah melainkan program *full day school* itu akan mengancam peran dan eksistensi dari keberadaan Madrasah Diniyyah (Madin) yang jumlahnya puluhan ribu dan tersebar

diseluruh daerah di Indonesia yang telah berkiprah cukup lama dalam pembangunan karakter bangsa secara kultural religius di lingkungan masyarakat.

Pro kontra tersebut diakhiri dengan keluarnya Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Menurut Supriatna (2017, hlm. 26) PPK merupakan realisasi revolusi mental dalam lembaga pendidikan yang sejalan dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), di mana pada Bab II, pasal 3, termaktub dalam UU tersebut bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dinyatakan pada Bab 1, pasal 21, Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini bertujuan untuk (1) Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa; (2) Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; (3) Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Selanjutnya pada pasal 3, PPK sendiri dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Berangkat dari keprihatinan dan fenomena belum berhasilnya penerapan pendidikan karakter di sekolah-sekolah umum oleh mantan Menteri Pendidikan

Nuraly Masum Aprily, 2019

PENDIDIKAN KARAKTER DI PESANTREN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN CIPARI
KABUPATEN GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Nasional, Muhammad Nuh ditanggapi dengan serius. Beliau akan mencontoh menerapkan model pendidikan karakter yang ada di pesantren dengan diberlakukan pada sekolah umum. Karena model pendidikan karakter yang dikembangkan oleh pesantren menurut beliau telah berhasil (Nurhidayat, 2016, hlm. 130). Tujuan transfer pendidikan karakter dari pesantren adalah untuk membentuk budaya sekolah yang dilakukan melalui pembiasaan nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Menurut Hidayat (2008) ada beberapa hal penting yang bisa ditransfer dari sistem model pesantren ke lembaga pendidikan umum, seperti keteladanan, pembiasaan, kepribadian, kepemimpinan, dan kewibawaan.

Nofiaturrahmah (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*Metode Pendidikan Karakter di Pesantren*” menyatakan bahwa pesantren telah terbukti secara empiris mampu mengembangkan santri dari berbagai aspek, meliputi kemampuan intelektual, emosional dan pembentukan watak religius, sehingga lahirlah *output* pesantren yang memiliki pengetahuan dan *akhlakul karimah* atau berkarakter.

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Yahya (2016) yang berjudul “*Model Pendidikan Karakter di Pesantren*” diperoleh hasil mengenai implikasi model pendidikan karakter yang dilakukan di pesantren yaitu, peningkatan kepribadian santri menjadi lebih baik melalui pembinaan yang dilakukan oleh pesantren berupa penegakan disiplin, membiasakan santri mengikuti semua kegiatan di dalam pesantren, serta peran Kyai dan Ustadz dalam memberikan keteladanan bagi para santrinya.

Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumardi (2012) yang berjudul “*Potret Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Salafiyah*” diperoleh hasil bahwa selain faktor keteladanan dan contoh nyata dalam kehidupan sehari yang diberikan oleh Kyai dan para Ustadz dalam mendidik karakter santrinya, ditemukan bahwa pendidikan karakter tidak harus selalu menggunakan kurikulum yang formal, tetapi cukup dengan *hidden curriculum* di mana pendidikan karakter tidak cukup hanya dilakukan di dalam kelas, melainkan harus dilakukan secara simultan di dalam dan di luar kelas. Ditemukan juga bahwa pendidikan karakter yang dilakukan di pesantren bukan merupakan bentuk “paksaan” namun dijalani

sebagaimana adanya kehidupan keseharian santri melalui berbagai macam kegiatan dalam pesantren yang justru akan membuat nilai-nilai karakter baik yang ditanamkan akan melekat dengan sendirinya pada diri setiap santri karena nilai-nilai itu sudah menjadi sebuah budaya di pesantren.

Keberhasilan pesantren dalam membentuk karakter santri karena pendidikan pesantren siswa diasramakan di pondok dalam bimbingan dan pengawasan Kyai, adanya wibawa dan keteladanan Kyai sebagai pemimpin pesantren dan suasana religius dalam pembelajaran di pesantren. Di samping itu, proses pendidikan pesantren lebih menekankan pada aspek *aqidah*, ibadah dan *akhlakul karimah* dengan pendekatan pendidikannya yang khas, seperti *ukhuwah*, ketaatan, keteladanan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan, keikhlasan, dan pluralitas (Dawam, 1995, hlm. 9).

Setelah peneliti melakukan studi pendahuluan ke pesantren Cipari pada hari Kamis 10 Januari 2019, peneliti mendapat beberapa keunggulan pondok pesantren Cipari yang menjadi kekhasan dalam praktek pendidikan karakter kepada para santrinya. Berdasarkan studi pendahuluan tersebut, peneliti mencatat beberapa keunggulan dan keunikan pesantren Cipari dalam mendidik karakter para santrinya sehingga menjadi santri yang berakhlak mulia (*akhlakul karimah*) adalah dimulai dengan keteladanan dari Kyai dan juga para ustadz sebagai *uswatun hasanah* dalam pembinaan dan pengembangan akhlak santrinya. Dilihat dari fungsi dan peran Kyai dan para ustadz di pesantren Cipari selain sebagai pengajar (guru), juga sebagai *murabbi* (pendidik) di mana dalam mendidik para santrinya selalu dilandasi rasa kasih sayang untuk mengantarkan santri ke depannya menjadi orang yang berhasil dan berakhlak, mengawasi perilaku santri, dan melayani santri selama 24 jam sebagaimana layaknya orang tua santri. Selain itu, dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan pada santri pesantren Cipari menggunakan *Nidzomul Ma'had* sebagai instrumen utama pembinaan akhlak para santri, di mana di dalamnya terkandung aturan-aturan dan tata tertib bagi seluruh santri yang wajib untuk dilaksanakan, sangsi-sangsi bagi santri yang melanggar peraturan, jadwal kegiatan santri berupa jadwal kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang wajib dilaksanakan dan mengikat bagi seluruh santri selama mondok di pesantren Cipari baik saat

Nuruly Masum Aprily, 2019

PENDIDIKAN KARAKTER DI PESANTREN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN CIPARI
KABUPATEN GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berada di dalam maupun di luar lingkungan pesantren sebagai sarana untuk membiasakan santri melakukan nilai-nilai kebaikan.

Keunggulan lainnya adalah pesantren Cipari memiliki nilai-nilai yang sudah menjadi budaya di pesantren sejak pertama kali pesantren ini berdiri, di antaranya adalah budaya *ta'dim* (menghormati) dan *takrim* (menghargai) dari para santri kepada Kyai dan juga para ustadz yang sampai saat ini masih dijaga, berupa akhlak berjalan, akhlak apabila bertemu dengan Kyai, ustadz dan yang lebih tua. Selanjutnya budaya makan bersama (*botram*) dalam satu piring atau wadah di pesantren Cipari merupakan hal yang sangat unik lainnya, budaya *botram* ini menurut pimpinan pesantren adalah bertujuan untuk menumbuhkan rasa dan nilai kebersamaan, nilai kesederhanaan, rasa kepedulian, dan rasa persaudaraan yang kuat antar sesama santri. Selain itu ada budaya restu Kyai, di mana sebelum para santri pulang ke rumah (saat libur), para santri akan berkeliling dan meminta izin serta restu dari Kyai dan seluruh ustadz di pesantren, begitu pun saat kembali ke pesantren santri akan datang menemui Kyai dan para ustadznya. Budaya-budaya yang ada di pesantren tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan dan menjadi salah satu keunikan pesantren Cipari dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada para santrinya sehingga melalui budaya-budaya akhlak tersebut hasilnya menjadi suatu watak dan kepribadian yang akan melekat pada diri santri.

Hal yang menarik dan unik lainnya adalah, pesantren Cipari menggunakan perjanjian hitam di atas putih yang wajib di tanda tangani oleh orang tua sebelum anaknya diterima menjadi santri di pesantren Cipari, di mana orang tua harus menerima semua persyaratan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pesantren, hal ini dilakukan agar pesantren memiliki kewenangan penuh dari orang tua untuk mendidik dan membina anaknya selama menempuh pendidikan di pesantren, serta mengurangi campur tangan dan intervensi dari orang tua kepada pesantren saat anaknya telah diterima menjadi santri di pesantren Cipari, hal tersebut dirasakan pesantren sangat efektif terutama dalam upaya pembinaan dan pengembangan akhlak para santrinya.

Melihat fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk mengungkap secara lebih jelas bagaimana pendidikan karakter di pondok pesantren Cipari melalui

berbagai keunggulan dan kekhasan yang dimiliki oleh pesantren Cipari tersebut, oleh karena itu peneliti menyajikannya dalam sebuah tesis yang berjudul “*Pendidikan Karakter di Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Cipari Kabupaten Garut)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu “Bagaimana pendidikan karakter di pesantren Cipari”.

Agar lebih memudahkan peneliti, maka rumusan masalah tersebut dijabarkan menjadi empat pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar-dasar pemikiran pesantren Cipari menyelenggarakan pendidikan karakter bagi para santrinya?
2. Bagaimanakah program pendidikan karakter di pesantren Cipari Kabupaten Garut?
3. Bagaimanakah penyelenggaraan pendidikan karakter di pesantren Cipari Kabupaten Garut?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan karakter di pesantren Cipari Kabupaten Garut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fakta-fakta tentang bagaimana pendidikan karakter di pesantren Cipari.

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dasar-dasar pemikiran pesantren Cipari sehingga menyelenggarakan pendidikan karakter bagi para santrinya.
2. Mendeskripsikan program pendidikan karakter di pesantren Cipari.
3. Mendeskripsikan penyelenggaraan pendidikan karakter di pesantren Cipari.
4. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan karakter di pesantren Cipari.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai lebih atau kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, diantaranya:

Nuraly Masum Aprily, 2019

PENDIDIKAN KARAKTER DI PESANTREN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN CIPARI
KABUPATEN GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Manfaat Dari Segi Teori

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mempertajam teori dan konsep mengenai pendekatan komprehensif dalam pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan (spiritual), terutama mengenai aspek keteladanan, disiplin moral, pembiasaan, dan budaya moral di sekolah, yang dilaksanakan di pesantren, deskripsi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar.

2. Manfaat Dari Segi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu acuan bagi pemegang kebijakan yaitu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya dalam merumuskan penyusunan program, kurikulum, dan materi-materi pendidikan karakter yang komprehensif di sekolah. Agar pelaksanaan pendidikan karakter dapat berkelanjutan, bukan hanya sekadar memberi pengetahuan teori saja, namun lebih komprehensif hingga tataran praktis dalam kehidupan siswa sehari-hari. Karena dari beberapa kajian mengenai pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia sebagian besar hanya merupakan pengajaran teori semata tanpa adanya refleksi dari ilmu yang telah diajarkan tersebut.

3. Manfaat Dari Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pendidikan dasar sebagai implikasi dari penelitian ini, baik pendidikan karakter dalam keluarga, lingkup persekolahan dan juga lingkungan masyarakat. Diharapkan pihak sekolah dan guru tidak lagi hanya berfokus pada pengembangan aspek pengetahuan konsep saja dalam proses pengembangan pendidikan karakter di sekolahnya, namun juga dapat mengadaptasi *best practice* yang dilakukan pesantren dalam mengembangkan pendidikan karakter terhadap peserta didiknya.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Penulisan tesis ini dilakukan secara terstruktur dengan mengikuti pola yang sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah yang diterapkan oleh Universitas

Pendidikan Indonesia (2018), meliputi: pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, temuan dan bahasan, serta simpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bab I Pendahuluan, menjelaskan landasan penelitian yang dilakukan dan disertai rasionalitas yang menekankan perlunya studi mendalam mengenai fokus masalah yang dikaji. Bab ini terdiri dari lima subbab, yakni: latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi tesis.

Bab II Kajian pustaka, menjelaskan beberapa konsep, generalisasi, dan teori yang dianggap relevan dan akan digunakan dalam mengkaji hasil penelitian, baik yang berasal dari hasil telaah terhadap buku-buku referensi maupun yang berangkat dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil telaah sebagaimana dimaksud terdiri dari: pengertian karakter; pengertian pendidikan karakter; nilai-nilai yang akan dikembangkan; proses penanaman dan internalisasi nilai-nilai karakter pada individu; pendekatan komprehensif dalam pengembangan pendidikan karakter; faktor-faktor yang mempengaruhi karakter individu; implementasi pendidikan karakter di luar negeri; strategi pendidikan karakter di Indonesia; pengertian pondok pesantren; peran dan fungsi pondok pesantren; sistem nilai di pesantren; unsur-unsur kelembagaan di pesantren; karakteristik sistem pendidikan di pesantren; pengembangan pendidikan akhlak di pesantren. Selain itu, pada bagian ini disarikan pula beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan kajian penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian dan disertai rasionalisasi dipilihnya desain dan pendekatan dimaksud. Selain itu, bab ini menjelaskan tentang partisipan, waktu dan lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Proses analisis data dengan *grounded theory* serta keabsahan data dengan teknik triangulasi data juga diuraikan dalam bab ini.

Bab IV Temuan dan Bahasan, menguraikan karakteristik partisipan serta gambaran umum hasil penelitian yang didapat dari wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan hasil lapangan. Hasil penelitian dibahas dengan membandingkan dengan teori-teori yang relevan, hasil studi dan catatan lapangan, untuk

menghasilkan suatu teori dasar (*grounded theory*) yang dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan kedepan yang berangkat dari realitas. Disamping itu Bab ini membahas cukup rinci tentang temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian yang dilakukan.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, menyampaikan sejumlah kesimpulan yang merupakan temuan penelitian dan dimaksudkan sebagai jawaban dari aspek yang dikaji. Selain itu, pada bab ini dijelaskan pula implikasi penelitian baik dalam kaitannya terhadap pengembangan keilmuan maupun dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Temuan-temuan dan implikasi penelitian menghasilkan gagasan-gagasan peneliti yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai upaya penyelesaian masalah yang dikaji.